



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024
 Reviewed : 10/07/2024
 Accepted : 11/07/2024
 Published : 16/07/2024

Yoga Aditya Eka
 Syahputrai¹
 Syahputra²
 Ni Made Dwi Ratnadi³

HUBUNGAN UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA PENGUNGKAPAN CSR PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan konsep triple bottom line yang meliputi people, planet, dan profit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 210 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling sehingga didapat sebanyak 78 sampel perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR sedangkan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada Pengungkapan CSR sedangkan Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Saham Publik yang semakin meningkat dapat mempengaruhi pengungkapan CSR.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Dewan Komisaris; Kepemilikan Saham Institusional; CSR

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate social responsibility based on the triple bottom line concept which includes people, planet and profit. This research aims to analyze the influence of company size, board of commissioners size, and institutional ownership on CSR disclosure in financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study was 210 companies. Sampling used a non-probability sampling method with a purposive sampling technique so that a sample of 78 companies was obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that company size has no effect on CSR disclosure, while the size of the board of commissioners and institutional share ownership have a positive effect on the company's Corporate Social Responsibility disclosure. Theoretically, this research can provide empirical evidence that company size has no influence on CSR disclosure, while the size of the Board of Commissioners and increasing public share ownership can influence CSR disclosure.

Keywords: Firm Size, Board of Commissioners Size, Institutional Share Ownership, CSR Disclosure

PENDAHULUAN

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial sekitar yang dapat meningkatkan reputasi serta citra perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line. Konsep triple bottom line berfokus pada 3P yaitu Profit, People, dan

^{1,2,3}) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia
 email: larasbudiyan@gmail.com¹

Planet. Konsep ini mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan tetapi juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Rachman, 2011: 10-12).

Fokus perusahaan dalam mencapai target kinerja seringkali membuat perusahaan melalaikan kewajibannya terhadap stakeholders sehingga menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti masalah sosial, pencemaran lingkungan, keamanan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang kasusnya terus meningkat di Indonesia (Asmeri et al., 2017).

Seiring berjalannya waktu urgensi akan pengungkapan CSR oleh perusahaan mulai ditanggapi dengan serius di Indonesia. Komitmen pemerintah mengenai regulasi yang mengatur pengungkapan CSR juga berkembang. Melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, OJK menyatakan bahwa perusahaan publik pertama kali wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan untuk periode laporan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 (OJK, 2017). Akan tetapi, pandemi Covid-19 menyebabkan adanya relaksasi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan di tahun 2021 adanya relaksasi penyusunan Laporan Keberlanjutan pertama kali untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 ditunda menjadi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 (OJK, 2022).

Pengungkapan CSR sangat penting bagi para stakeholders karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan pengungkapan CSR dapat mempengaruhi image dari perusahaan itu sendiri. sejalan dengan Teori Stakeholders Dimana pada teori ini dijelaskan bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi hanya untuk dirinya sendiri tetapi memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya (Freeman, 2004)

Ukuran perusahaan yang semakin besar menyebabkan perhatian yang diperoleh perusahaan dari masyarakat juga semakin besar karena pengaruh yang diberikan perusahaan pada lingkungan masyarakat tersebut juga semakin besar sehingga pada umumnya perusahaan akan meningkatkan volume tanggung jawab sosialnya.

Dewan Komisaris dapat memberikan tekanan kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR agar memenuhi kepentingan stakeholders. Dewan komisaris juga mampu mendorong dan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen karena dewan komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada manajemen

Kepemilikan saham institusional yang besar pada perusahaan infrastruktur akan memperkuat tekanan dan tuntutan pemilik saham, sehingga CSR yang diungkapkan akan semakin luas (Singal & Putra, 2019).

Teori stakeholders menyatakan hubungan ukuran dan pengungkapan dimana perusahaan yang lebih besar akan memiliki aktivitas yang lebih disorot oleh publik sehingga mendorong pengungkapan sosial yang lebih lengkap. Keberadaan suatu organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut apabila masyarakat menyadari bahwa perusahaan tersebut beroperasi untuk sistem nilai yang sejalan dengan norma masyarakat itu sendiri. Semakin besar suatu perusahaan maka tanggung jawabnya semakin besar karena luasnya pengaruh yang diberikan perusahaan pada masyarakat Indraswari & Astika (2015), Yanti & Budiasih (2016), Pramesti & Budiasih (2020). Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility

Teori stakeholder menjelaskan jika dewan tidak hanya melindungi kepentingan pemegang sahamnya namun juga kepentingan semua pemangku kepentingan (Freeman & Reed, 1983). Ukuran dewan dapat berpengaruh cukup besar pada taraf mengungkap laporan tahunan, termasuk mengungkap pertanggung jawaban sosial. Bertambah besarnya ukuran dewan, membuat kemampuannya dalam melakukan kegiatan pertanggung jawaban sosial perusahaan juga bertambah besar (Nadeem et al., 2017), (Abu Qa'dan & Suwaidan, 2019), Yanti et al., (2021). Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu

H₂: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility

Kepemilikan Saham Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer (Machmud & Djakman, 2008). Hasil penelitian Reni & Anggraini (2006) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh pada pengungkapan CSR. kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR. CSR biasanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan menimbulkan goodwill diantara pemangku kepentingan. Maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian

H₃: Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui situs resmi BEI. Adapun alasan memilih seluruh sektor keuangan dikarenakan sektor ini berkaitan erat dengan kondisi moneter Indonesia dan sektor ini juga memiliki regulasi yang lebih ketat dibandingkan sektor lainnya. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yakni Perusahaan sektor keuangan yang menyertakan sustainability report dan annual report baik di situs BEI maupun di situs resmi perusahaan dan Perusahaan sektor keuangan yang mengungkapkan laporan Sustainability Report menggunakan standar GRI-standards 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 78 amatan. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR sedangkan variabel independent dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X1), ukuran dewan komisaris (X2), dan kepemilikan saham institusional(X3). Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe industry (X4). Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diproses dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah item informasi CSR yang diungkapkan}}{36 \text{ item CSR GRI-standard}} \dots\dots\dots(1)$$

Ukuran Perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan log natural total aset, agar tidak terjadi fluktuasi data yang berlebihan. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Log N (Total Aset)} \dots\dots\dots(2)$$

Ukuran dewan komisaris adalah pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan penilaian atas tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Besaran dewan dinilai dengan banyaknya dewan direksi dan komisaris dalam perusahaan (Galbreath, 2016) dan (Cherian et al., 2019).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{jumlah dewan komisaris} \dots\dots\dots(3)$$

Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Sartono, 2010) dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Kepemilikan Saham Institusional} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh institusional}}{\text{jumlah saham beredar}} \dots\dots\dots(4)$$

Tipe Industri dalam penelitian ini diukur menggunakan variable dummy dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan sektor keuangan industri perbankan dan nilai 0 pada perusahaan sektor keuangan industri non-perbankan.

Data penelitian merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia di BEI selama periode 2021-2022. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \dots\dots\dots(5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Mean	Max	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan (X_1) (dalam Miliar Rupiah)	78	7,12	236.082,56	1.992.544,69	449.525,15
Ukuran Dewan Komisaris (X_2)	78	2,00	5,57	13,00	2,44
Kepemilikan Saham Institusional (X_3)	78	0,75	0,93	0,99	0,05
Tipe Industri (X_4)	78	0,00	0,76	1,00	0,42
Pengungkapan CSR (Y)	78	0,28	0,45	0,72	0,09

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki total aset rata-rata sebesar Rp236.082,56 Miliar dan total aset minimum sebesar Rp7,12 Miliar pada Clipan Finance Indonesia Tbk. di periode pengamatan 2021. Total aset maksimum sebesar Rp1.992.544,69 Miliar pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. di periode pengamatan 2022. Ukuran Perusahaan memiliki standar deviasi sebesar Rp449.525,15 lebih tinggi dari pada mean yang berarti menunjukkan adanya penyebaran data yang lebar atau variasi yang besar dalam ukuran perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI rata-rata sebanyak 6 orang dan minimum sebanyak 2 orang pada Bank Maspion Indonesia di periode pengamatan 2021. Nilai maksimum sebanyak 13 orang pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) di periode pengamatan 2022. Ukuran Dewan Komisaris memiliki standar deviasi sebesar 2 lebih rendah daripada mean yang berarti menunjukkan adanya penyebaran data yang sempit atau variasi yang kecil dalam ukuran dewan komisaris.

Kepemilikan Saham Institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 93% yang berarti 93% dari saham yang beredar dimiliki oleh institusi seperti lembaga reksa dana, perusahaan investasi, asuransi, broker, yayasan, bank. Nilai minimum 75% pada Clipan Finance Indonesia Tbk. di periode pengamatan 2022. Nilai maksimum sebesar 99% pada Bank Maybank Indonesia Tbk. di periode pengamatan 2021 dan 2022. Kepemilikan Saham Institusional memiliki nilai standar deviasi sebesar 5% lebih rendah daripada mean yang berarti menunjukkan adanya penyebaran data yang sempit atau variasi yang kecil dalam kepemilikan saham institusional.

Tipe Industri memiliki nilai rata-rata sebesar 76% yang berarti 76% dari sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan. 24% dari seluruh sampel adalah perusahaan sektor keuangan non perbankan.

Pengungkapan CSR memiliki nilai rata-rata 45% yang berarti 45% dari total 36 pengungkapan CSR topik sosial pada pedoman GRI-standards 2021 telah diungkapkan oleh perusahaan sampel. Sedangkan nilai minimum sebesar 28% pada Bank Aladin Syariah Tbk. di periode pengamatan 2021, sedangkan nilai maksimum sebesar 72% pada Bank Tabungan Negara di periode pengamatan 2022. Pengungkapan CSR perusahaan memiliki standar deviasi sebesar 9% lebih rendah daripada mean yang berarti menunjukkan adanya penyebaran data yang sempit atau variasi yang kecil dalam pengungkapan CSR.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas	
Unstandardized Residual	
N	78
Test Statistic	0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Uji Multikolinearitas	
Collinearity Statistics	

Keterangan			Tolerance	VIF	
Ukuran Perusahaan (X_1)			0,240	4,163	
Ukuran Dewan Komisaris (X_2)			0,533	1,877	
Kepemilikan Saham Institusional (X_3)			0,779	1,284	
Tipe Industri (X_4)			0,417	2,398	
Uji Heteroskedastisitas					
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
Keterangan	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,059	0,127		0,465	0,644
Ukuran Perusahaan (X_1)	-0,007	0,005	-0,345	-1,495	0,139
Ukuran Dewan Komisaris (X_2)	0,006	0,003	0,264	1,702	0,093
Kepemilikan Saham Institusional (X_3)	0,194	0,122	0,203	1,585	0,117
Tipe Industri (X_4)	0,009	0,022	0,070	0,400	0,690
Uji Autokorelasi					
	R	R ²	Adjusted R ²	Std Error	Durbin Watson
	0,541	0,293	0,250	0,08547	1,912

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel bebas dan terikat sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Institusional, dan Tipe Industri berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari seluruh variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel pada model regresi yang digunakan memiliki nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai dw yang dihasilkan sebesar 1,977. Oleh karena jumlah sampel $n=78$ dan $k=3$, diperoleh nilai $dL = 1,5535$ dan $du = 1,7129$, sehingga diperoleh nilai $4-du = 2,2871$, maka dapat dirumuskan kriteria $du < dw < 4-du$ yaitu $1,7129 < 1,912 < 2,2871$. Hal ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,124	0,206		-0,603	0,549
Ukuran Perusahaan (X_1)	0,004	0,007	0,116	0,575	0,567
Ukuran Dewan Komisaris (X_2)	0,012	0,005	0,295	2,183	0,032
Kepemilikan Saham Institusional (X_3)	0,395	0,197	0,224	2,002	0,049
Tipe Industri (X_4)	0,019	0,035	0,082	0,536	0,593

Adjusted R Square	0,250				
F _{Hitung}	7,405				
Sig. F _{Hitung}	0,000				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y = -0,158 + 0,004 X_1 + 0,012 X_2 + 0,447 X_3 + 0,018 X_4 \dots\dots\dots (6)$$

Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pada model yang diuji memiliki signifikansi atau layak (fit). Hasil ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh signifikan antara faktor Ukuran perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Institusional, dan Tipe Industri secara simultan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3, diperoleh besarnya adjusted R² (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) pada Tabel regresi adalah 0,250. Ini berarti variasi Pengungkapan CSR dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variable Ukuran perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Institusional, dan Tipe Industri sebesar 25 persen sedangkan sisanya sebesar 75 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Nilai konstanta (α) sebesar -0,124 adalah tidak mungkin terjadi karena Pengungkapan CSR (Y) bernilai tidak mungkin bernilai negatif dan karena ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan saham institusional perusahaan tidak mungkin bernilai 0. Maka jika nilai minimum dari Ukuran Perusahaan (X₁), Ukuran Dewan Komisaris (X₂), Kepemilikan Saham Institusional (X₃), dan Tipe Sub-Sektor (X₄) dimasukkan kedalam persamaan regresi maka didapat nilai pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,28701.

Nilai koefisien $\beta X_1 = 0,004$ artinya jika nilai Ukuran Perusahaan (X₁) naik sebesar Rp1 maka pengungkapan CSR (Y) akan meningkat sebesar 0,004 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Tingkat signifikansi ukuran perusahaan bernilai 0,567 lebih besar dari 0,05 dan koefisien uji t sebesar 0,575 yang berarti Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR atau H₁ ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak terkait dengan besar dan kecilnya ukuran perusahaan, karena ukuran perusahaan tidak hanya dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki bisa juga dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, atau dari laba yang dimiliki (Rukmana et al., 2020).

Nilai koefisien $\beta X_2 = 0,012$ artinya jika nilai Ukuran Dewan Komisaris (X₂) naik sebesar 1 orang maka nilai pengungkapan CSR (Y) akan meningkat sebesar 1,2 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Tingkat signifikansi ukuran dewan komisaris bernilai 0,032 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien uji t sebesar 2,183 yang berarti Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan CSR atau H₂ diterima. Hasil ini mampu mendukung teori stakeholder, dimana peningkatan jumlah anggota dewan komisaris dapat mendukung pengawasan perusahaan, artinya bahwa dewan komisaris adalah perpanjangan tangan dari pemegang saham (shareholders) dan masyarakat (stakeholders) yang dapat memonitor pihak manajer, sehingga dewan komisaris dapat mengontrol tindakan dan kebijakan yang akan diberlakukan oleh manajer sebagai pengawas serta memastikan implementasi kebijakan dengan tujuan yaitu untuk memaksa manajer agar fokus pada kepentingan stakeholders.

Nilai koefisien $\beta X_3 = 0,395$ artinya jika nilai Kepemilikan Saham Institusional (X₃) naik sebesar 1 maka nilai pengungkapan CSR (Y) akan meningkat sebesar 39,5 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Tingkat signifikansi kepemilikan saham institusional bernilai 0,049 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien uji t sebesar 2,002 yang berarti Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR atau H₃ diterima. Hasil penelitian ini mampu mendukung teori stakeholder artinya, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi pastinya akan lebih memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyak perusahaan memegang kepercayaan institusi lain maka institusi pastinya akan memperhatikan

apakah perusahaan tempatnya berinvestasi melakukan tindakan sosial yang mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Nilai koefisien $\beta X_4 = 0,019$ artinya jika nilai Tipe Industri (X_4) naik sebesar 1 maka nilai pengungkapan CSR (Y) akan meningkat sebesar 1,9 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris. Pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham institusional pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini menunjukkan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan, tidak dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. perusahaan besar ataupun perusahaan kecil memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama atas lingkungan sekitar perusahaannya akibat dari kegiatan produktivitas yang dilakukan.

Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi jumlah dewan komisaris suatu perusahaan, maka upaya pengungkapan CSR akan cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena dewan komisaris mampu mengawasi dan memberi tekanan pada manajemen untuk fokus pada tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Perusahaan sektor keuangan yang kepemilikan institusionalnya meningkat menunjukkan semakin besarnya pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan institusi lebih tinggi akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada institusi.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada periode dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas periode penelitian ini sehingga mencakup tahun 2023 dan seterusnya serta agar dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti leverage, eco-control, dan emisi karbon dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Qa'dan, M.B. & Suwaidan, M.S. (2019). Board Composition, Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), pp. 28–46. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0225>.
- Asmeri, R., Alvionita, T. & Gunardi, A. (2017). CSR Disclosures in the Mining Industry: Empirical Evidence from Listed Mining Firms in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 1(1), pp. 16–22. <https://doi.org/10.28992/ijssam.v1i1.23>.
- Cherian, J. et al. (2019). Does Corporate Social Responsibility Affect the Financial Performance of the Manufacturing Sector? Evidence from an Emerging Economy. *Sustainability*, 11(4), pp. 1–14. <https://doi.org/10.3390/su11041182>.
- Freeman, R.E. (2004). The Stakeholder Approach Revisited. *Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik*, 5(3), pp. 228–241. <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2004-3-228>.
- Freeman, R.E. & Reed, D.L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), pp. 88–106. <https://doi.org/10.2307/41165018>.
- Galbreath, J. (2016). Is Board Gender Diversity Linked to Financial Is Board Gender Diversity Linked to Financial Performance? The Mediating Mechanism of CSR. *Business & Society*, 57(5), pp. 863–889. <https://doi.org/10.1177/0007650316647967>.
- Indraswari, G.A.D. & Astika, I.B.P. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan CSR. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), pp. 289–302.
- Machmud, N. & Djakman, C.D. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan

- Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi 11.
- Nadeem, M., Zaman, R. & Saleem, I. (2017). Boardroom Gender Diversity and Corporate Sustainability Practices: Evidence from Australian Securities Exchange Listed Firms. *Journal of Cleaner Production*, 149(1), pp. 874–885. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.141>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/POJK.03/2017. (2017). Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. (2022). Indonesia.
- Pramesti, A.A.W.L. & Budiasih, I.G.A.N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), pp. 1006–1018.
- Rachman. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Reni, F. & Anggraini, R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX*, pp. 1–21.
- Rukmana, U.N.A., Akram & Pituringsih, E. (2020). Prediktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal EMBA*, 8(4), pp. 156–167.
- Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Singal, P.A. & Putra, I.N.W.A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 298(1), pp. 468–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p30>.
- Yanti, N.K.A.G. & Budiasih, I.G.A.N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), pp. 1752–1779.
- Yanti, N.L.E.K., Endiana, I.D.M. & Pramesti, I.G.A.A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kharisma*, 3(1), pp. 42–51.